



Sistem Akuntansi Penggajian Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Sitti Fadriyah¹, Arif Mashuri², Kristison Tobeoto³, Retno Widya Pratiwi⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya

Email : siti_fajriah@stimplasharanjaya.ac.id¹, arif@stimplasharanjaya.ac.id², kristison@stimplasharanjaya.ac.id³, Retnowidyapратиwi8@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Penggajian Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data digunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi penggajian pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan sudah berjalan secara efektif. karena setiap transaksi penggajian yang dilakukan sudah diverifikasi dan diteliti kembali kebenarannya sebelum dilakukan pembayaran gaji pegawai, namun terdapat beberapa dokumen yang tidak lagi digunakan dalam proses penggajian seperti amplop gaji dikarenakan pembayaran gaji pegawai sudah melalui Bank yaitu mentransfer ke masing-masing rekening pegawai.

Kata kunci : Sistem, Akuntansi, Penggajian, Badan Pusat Statistik

1. Latar Belakang

Pengambilan keputusan yang baik adalah pengambilan keputusan yang didasarkan oleh informasi yang tepat dan akurat sehingga untuk memenuhi hal tersebut diperlukan adanya suatu sistem akuntansi yang baik.

Menurut Baridwan (2016:4), yang menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah formulir, catatan, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan - laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya

Salah satu sistem yang digunakan manajemen dalam hal ini adalah sistem akuntansi penggajian. Sistem akuntansi penggajian dirancang oleh instansi pemerintah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji pegawai sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan. Pengawasan yang baik juga dapat memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan pangkat golongan yang ditetapkan dalam PPRI Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas peraturan pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang pengaturan gaji pegawai pemerintah.

Tabel 1 Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil

No	Golongan PNS	Besar Gaji
1	Golongan I	Rp. 1.685.700 – 2.901.400
2	Golongan II	Rp. 2.184.000 – 4.125.600
3	Golongan III	Rp. 2.785.700 – 5.180.700
4	Golongan IV	Rp. 3.287.800 – 6.373.200

Sumber : Data diolah 2024

Dalam aktivitasnya sehari-hari, instansi pemerintah ini tentu saja terlihat cukup besar dan tidak terlepas dari peran serta pegawainya. Maka, instansi pemerintah ini haruslah memiliki sistem akuntansi penggajian yang baik, yang didalamnya menerapkan unsur-unsur yang terkait tentang gaji, yaitu mengenai fungsi atau bagian, dokumen yang digunakan serta prosedur yang membentuk sistem gaji. dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbasis komputerisasi, sehingga dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan.

2 Metode Penelitian

Metode Analisis

Menurut Miles dan Huberman dalam Sirajuddin Saleh (2017:174) mengatakan bahwa analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Tahap pertama peneliti akan mengumpulkan data yang akan diperoleh dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk hasil yang bisa didapat dari porses observasi berupa struktur organisasi, gambaran umum profil dan visi misi dari Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk hasil wawancara yaitu, pernyataan yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Penggajian antara lain: fungsi-fungsi, dokumen-dokumen, serta prosedur sistem akuntansi penggajian. Untuk hasil dokumentasi berupa daftar karyawan, pencatatan penggajian, dan beberapa dokumen yang terkait. Data disajikan dalam bentuk transkrip observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada aspek-aspek penting, dan mencari tema maupun polanya. Mereduksi berarti meringkas, memilih dan memfokuskan. Jawaban wawancara dan hasil observasi dimaknai secara mendalam sesuai konteks penelitian. Hasil penelitian diklasifikasikan menurut topik penelitian. Berdasarkan hasil pemahaman tersebut maka diperoleh data yang berguna bagi penelitian dan data yang tidak sesuai dengan topik penelitian.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar komponen, diagram alir dan sejenisnya. Pada penelitian ini penyajian data disajikan secara jelas dan menjadikan alur penelitian dapat dipahami. peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel dan flowchart (bagan) untuk memperjelas hasil analisis. Serta berbagai bentuk upaya untuk mengatasi timbulnya kesalahan-kesalahan dalam bentuk uraian singkat yang menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian.

d. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara, dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika peneliti kembali ke lokasi untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang diambil terlebih dahulu didukung oleh bukti yang dapat dipercaya dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah benar. Peneliti melakukan verifikasi hasil analisis dengan cara membandingkan temuan-temuan dengan teori-teori yang relevan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Penyajian Dan Analisa Data

Menurut Sistem Penggajiannya Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Mengikuti Pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji Pokok Adalah Gaji Yang Diberikan Kepada Pegawai Berdasarkan Golongan Yang Setiap Golongannya Memiliki Pangkat Masing-Masing. Berdasarkan Tabel Gaji Sebagai Berikut:

Tabel 2 Gaji Pegawai

Gol 1	Gaji	Gol 2	Gaji	Gol 3	Gaji	Gol 4	Gaji
1a	1.685-2.522	2a	2.184-3.643	3a	2.785-4.575	4a	3.287-5.399
1b	1.840-2.670	2b	2.385-3.797	3b	2.903-4.768	4b	3.426-5.628

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.805>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1c	1.918-2.783	2c	2.485-3.958	3c	3.026-4.970	4c	3.571-5.866
1d	1.999-2.901	2d	2.591-4.125	3d	3.154-5.180	4d	3.723-6.114

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Memiliki 79 Orang Pegawai Dengan Masing-Masing Golongan, Berdasarkan Data Yang Diperoleh Oleh Penulis Sebagai Berikut:

Tabel 3 Golongan Gaji Pegawai Bps Provinsi Sulawesi Selatan.

Gol	Pegawai	Suami/Istri	Anak	Jumlah Jiwa
Iv	13	9	15	37
Iii	64	29	48	141
Ii	2	1	0	3
I	0	0	0	0
Jumlah	79	39	63	181

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Pada Tabel Diatas Menunjukkan Golongan Gaji Pegawai Di Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Dimana Terdapat Empat Golongan Yang Pertama Golongan I Tidak Ada Pegawai Yang Termasuk Didalam Golongan tersebut, Selanjutnya Pada Golongan Ii Terdapat 2 Pegawai, Golongan Iii Memiliki 64 Pegawai, Dan Golongan Iv Terdapat 13 Pegawai Dengan Jumlah Pegawai 79 Pegawai.

Selain Gaji Pokok, Pegawai Bps Provinsi Sulawesi Selatan Juga Mendapatkan Tunjangan Yaitu:

- Tunjangan Suami/Istri, Yaitu Tunjangan Yang Diberikan Kepada Pegawai Yang Bersuami Dan Beristri Yang Sah.
 Perhitungan Gaji Gol 1a Rp.2.522,000 X 10% = Rp. 252.200 Tunjangannya Istri/Suami, Apabila Suami Istri Kedua – Duanya Berkedudukan Sebagai Pns, Maka Tunjangan Diberikan Kepada Yang Mempunyai Gaji Pokok Yang Lebih Tinggi.
- Tunjangan Anak Diberikan Kepada Pegawai Yang Mempunyai Maximal 2 Anak Yang Berumur Kurang Dari 21 Tahun, Belum Pernah Kawin, Tidak Memiliki Penghasilan Sendiri, Dan Nyata Menjadi Tanggungannya Pegawai Yang Bersangkutan. Atau Telah Berusia 21 Tahun Sampai Dengan 25 Tahun Bagi Anak Yang Telah Melanjutkan Pendidikan Formal, Akan Tetap Menerima Tunjangan.
 Perhitungan Gaji Gol 1a Rp.2.522.00 X 2% = Rp.50.440 Dari Gaji Pokok Untuk Tunjangan Anak Per Orang
- Tunjangan Jabatan Dibagi Menjadi Tunjangan Jabatan Struktural Dan Fungsional. Tunjangan Jabatan Struktural Yaitu Tunjangan Yang Didapat Pns Yang Menjabat Sebagai Jabatan Struktural Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Dan Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Dari Pejabat Yang Berwenang. Sedangkan Tunjangan Jabatan Fungsional Adalah Tunjangan Yang Didapat Oleh Pns Yang Menjabat Sebagai Jabatan Fungsional Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Dan Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Dari Pejabat Yang Berwenang.
- Tunjangan Umum Adalah Tunjangan Yang Diberikan Kepada Pns Yang Tidak Menduduki Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional.
- Tunjangan Beras Diberikan Kepada Pegawai Dan Anggota Keluarganya Dalam Bentuk Natura (Beras) 10 Kg/Jiwa Atau Dalam Bentuk Inatura (Uang) Dengan Besaran Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.
- Tunjangan Pajak Penghasilan Yang Dimaksud Tunjangan Ini Adalah Tunjangan Yang Diberikan Oleh Negara Tetapi Tunjangan tersebut Dimasukan Dalam Potongan Pph Pasal 21 Untuk Itu Pph tersebut Tidak Mempengaruhi Besarnya Gaji Pns Yang Didapat. Adapun Potongan-Potongan Yang Dikenakan Pada Setiap Pegawai Bps Provinsi Sulawesi Selatan Antara Lain:
 - Iwp (Iuran Wajib Pegawai) Dipungut Dari Setiap Pegawai Pemerintah Dan Pegawai Negeri Dengan Memotong 10% Penghasilan Bulanannya Untuk Dana Kerja Dibidang Kesejahteraan. Potongan Gaji Pegawai tersebut meliputi:

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.805>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1. Iuran Dana Pensiun
 2. Iuran Pemeliharaan Kesehatan
- b. Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph21) Adalah Potongan Pajak Yang Dikenakan Terhadap Penghasilan Pegawai Negeri Yang Melampaui Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp).

Tabel 4 Daftar Gaji Pegawai Bps Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan	
Daftar Gaji	
Untuk Para Pegawai Gol. Ii, Iii, Iv	
Bulan: Agustus 2024	
Penghasilan:	
1. Gaji Pokok	Rp. 292.795.300
2. Tunjangan Suami/Istri	Rp. 15.267.070
3. Tunjangan Anak	Rp. 4.926.448
4. Tunjangan Perb. Penghasilan	
5. Tunjangan Struktural	Rp. 4.510.000
Tunjangan Fungsional	Rp. 49.814.000
Tunjangan Fungsional Lain	Rp. 0
6. Tunjangan Umum	Rp. 1.470.000
7. Tunjangan Tambahan Umum	Rp. 0
8. Tunjangan Papua	Rp. 0
9. Tunjangan Wilayah Terpencil	Rp. 0
10. Tunjangan Beras	Rp. 13.108.020
Jumlah Bruto	Rp. 381.108.020
11. Tunjangan Pajak Penghasilan	Rp. 832.074
12. Pembulatan	Rp. 3.731
Jumlah Kotor	Rp. 382.726.643
Potongan	
1. Ppk Beras	Rp. 0
2. Simpanan Wajib	Rp. 25.039.089
3. Bpjs	Rp. 7.358.398
4. Bpjs Keluarga Yang Lain	Rp. 88.434
5. Sewa Rumah	Rp. 1.863.048
6. Tunggakan	Rp. 0
7. Hutang Kelebihan	Rp. 0
8. Lain-Lain	Rp. 0
9. Pajak Penghasilan	Rp. 832.074
10. Tabungan Perumahan	Rp. 0
Jumlah Potongan	Rp. 35.181.043
Jumlah Bersih	Rp. 347.545.600
<i>“Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah”</i>	

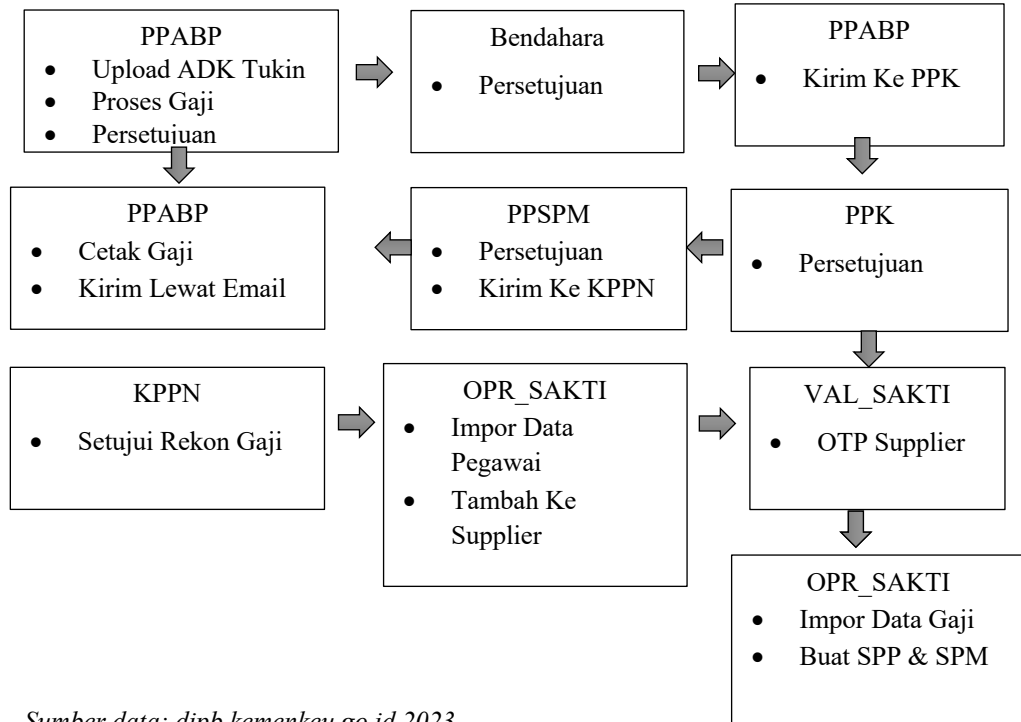
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Tabel Diatas Merupakan Rekapitulasi Gaji Pegawai Badan Pusat Statistik Untuk Periode Bulan Agustus 2024, Berdasarkan Tabel Diatas Bps Provinsi Sulawesi Selatan Memiliki Gaji Pokok

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.805>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Untuk Pegawai Sebesar Rp. 292.795.300 Besaran Gaji Pokok Ini Merupakan Rekapitulasi Dari Jumlah Pegawai Bps Provinsi Sulawesi Selatan Yang Berjumlah 79 Orang Pegawai. Pada Tabel Diatas Terdapat Rincian Gaji Dengan Potongan Dan Tunjangan-Tunjangan nya Mulai Dari Istri/Suami, Anak, Struktural, Dll Dengan Total Keseluruhan Potongan Sebesar Rp. 35.181.043 Menghasilkan Jumlah Bersih Gaji Sebesar Rp. 347.545.600.



Sumber data: djpb.kemenkeu.go.id 2023.

b. Pembahasan

Berdasarkan penyajian data diatas maka dalam sistem akuntansi penggajian yang dilakukan dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan disesuaikan golongan dan tunjangan –tunjangan yang diberikan dan diterapkan di BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah sesuai dengan Undang-undang /PMK/Peraturan yang berlaku Penggajian yang dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang tadi diberikan amplop untuk pegawai sekaran sudah diganti dengan mentransfer langsung ke masing – masing ke rekening pegawai

4. Kesimpulan

Sistem akuntansi penggajian pegawai yang diterapkan di BPS Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan UU/PMK/Peraturan yang berlaku tetapi kurang sesuai dengan Mulyadi, 2016 dikarenakan dokumen yang digunakan dalam penggajian pegawai pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan sudah terkomputerisasi dengan baik, dengan mengganti kartu jam hadir dan jam kerja dengan aplikasi presensi yang dapat memudahkan fungsi pencatat waktu dalam menghitung kekurangan jam kerja dari setiap pegawai, kemudian pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan amplop gaji pegawai sudah diganti dengan mentransfer langsung gaji ke rekening masing-masing pegawai.

REFERENSI

- A, Ibrahim, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Andra Tersiana. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta.

- Andreina, D. A. S. (2019). *Analisis sistem dan prosedur penggajian pegawai negeri sipil (studi kasus pada pegawai penerima TKPKN Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang.
- Anggraini, Siska. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare: Perspektif Keuangan Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Z. (2016). *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode (Edisi 5)*. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Darwin, M., Mamondol, M.R., Sormin, S.A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I.M.D.M., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A.A. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Panduan Proses Pembuatan Gaji Induk pada Gaji Web (Semua Satker PNS Pusat)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/pati/id/data-publikasi/juknis-sakti.html>
- Fadli, M., Rajindra, & Guasmin. (2022). *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Kolaboratif Sains, 5(1), 1-6.
- Firdausi, Aicha. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Pada UKM UD Anzaz Konveksi Banyuwangi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Harnanto. (2019). *Dasar-Dasar Akuntansi (Edisi 2)*. Yogyakarta: Andi.
- Hasanah, H. (2018). Efektivitas pengendalian internal pada sistem penjualan kredit PT. Forisa Nusapersada (Periode 2015-2017). Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Hasibuan. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Horngren, Charles T., & Harrison Jr, Walter T. (2017). *Akuntansi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Husnan, Suad, & Pudjiastuti, Enny. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Edisi Ketujuh)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Khasanah Uswatun. (2020). *Pengantar Microteaching*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Maniah, S.Kom., M.T., & Hamdini, D.Si., Mba., Mt. (2017). *Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pembahasan Secara Praktis Dengan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Martono, Harjito. (2015). *Manajemen Keuangan (Edisi Keenam)*. Yogyakarta: Sumber Ilmu.
- Mei H. M. Munte. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi 1*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Mukhid, Abd. (2019). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurdianto, Ade. (2021). *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada SPEKU Delivery Kota Samarinda)*. Universitas Mulawarman Samarinda.